

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan baik dan efisien, manajemen kinerja OPD sangat penting. Dengan manajemen kinerja yang baik, OPD dapat menetapkan tujuan yang jelas, mengukur pencapaian, dan melakukan evaluasi secara teratur. Manajemen kinerja yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, pengembangan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan menentukan area mana yang memerlukan perbaikan. Akibatnya, manajemen kinerja yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Manajemen kinerja di tingkat organisasi berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, di mana terdapat struktur hubungan antar individu yang memiliki tujuan bersama untuk memajukan kepentingan kolektif. Kinerja organisasi sangat mempengaruhi arah yang akan diambil oleh seluruh anggotanya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kinerja yang baik agar visi organisasi dapat tercapai. Kinerja dari organisasi publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga berdampak pada proses pembangunan di suatu daerah.

Bagian Pasar Dinas, Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang merupakan Organisasi Pemerintah yang berkecimpung dalam bidang pelayanan perdagangan, koperasi dan juga UKM. Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang (Bidang Pasar) memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. Meningkatkan layanan publik;
- c. Menjadi penggerak ekonomi lokal; dan
- d. Menjadikan pasar tradisional berdaya saing tinggi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- e. Memberikan perlindungan dan perkuatan terhadap daya saing kepada Pedagang di Pasar tradisional; dan
- f. Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan tersebut merupakan bagian dari visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas perdagangan, mengembangkan Pasar dan distribusi produk, serta meningkatkan sumber daya dan infrastruktur pendukung Pasar tradisional. Sementara Program Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan difokuskan untuk memelihara gedung Pasar serta menyediakan sarana dan prasarana Pasar yang memadai.

Dengan adanya kedua program ini, diharapkan Bagian Pasar dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, terutama terkait pengelolaan dan penataan Pasar tradisional di Kabupaten Rembang.

Di Kabupaten Rembang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti bahan pangan sendiri itu masih mengandalkan keberadaan Pasar tradisional hal ini dikarenakan belum terdapat Pasar modern yang menyediakan fasilitas lengkap seperti bahan pokok pangan seperti yang disediakan oleh Pasar tradisional melainkan hanya terdapat toko-toko kelontong dan juga *Indomaret* dan *Alfamart* yang notabene bisa disebut juga *Minimarket* modern.

Tabel 1. 1

Jumlah Pasar Kabupaten Rembang 2022

Kecamatan	Pasar Umum	Pasar Desa	Pasar Hewan	Pasar Buah	Pasar Toko Modern	Jumlah
Sumber	1	2	0	0	0	3
Bulu	0	1	0	0	0	1
Gunem	1	0	0	0	0	1
Sale	1	0	0	0	0	1
Sarang	1	0	0	0	0	1
Sedan	2	0	0	0	0	2
Pamotan	1	0	1	0	0	2
Sulang	1	0	0	0	0	1
Kaliori	0	3	0	0	0	3
Rembang	2	0	1	0	0	3
Pancur	0	0	0	0	0	0
Kragan	2	1	1	0	0	4
Sluke	0	1	0	0	0	1
Lasem	3	0	1	0	0	4
Kab. Rembang	15	8	4	0	0	27

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang

Berdasarkan tabel 1.1 disebutkan beberapa jenis Pasar yang salah satunya yaitu Pasar umum. Terdapat 15 Pasar umum yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Rembang melalui dinas terkait yang terdiri atas:

1. Pasar Kota Rembang
2. Pasar Magersari
3. Pasar Sulang
4. Pasar Sumber
5. Pasar Lasem
6. Pasar Kreatif Lasem
7. Pasar Pamotan
8. Pasar Jolotundo
9. Pasar Kragan
10. Pasar Sarang
11. Pasar Tegaldowo
12. Pasar Gandri
13. Pasar Sedan
14. Pasar Pandangan
15. Pasar Wonokerto

Menurut data yang penulis peroleh dari Dinas Indagkop & UKM Rembang terdapat sejumlah 15 Pasar umum, 8 Pasar desa, dan 4 Pasar hewan atau keseluruhan terdapat 27 Pasar yang ada di Kabupaten Rembang. Dari seluruh Pasar yang ada di Kabupaten Rembang baru ada satu Pasar

yang berstandar SNI. Kesan masyarakat pada umumnya menganggap Pasar rakyat sebagai tempat yang kotor dan berlumpur. Namun, pandangan negatif tersebut kini dapat dihilangkan dengan menerapkan standar baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat. Penerapan SNI Pasar Rakyat merupakan wujud nyata komitmen, terutama dari pemerintah daerah dan para pelaku usaha, untuk melindungi kepentingan konsumen di daerah masing-masing, yang juga secara tidak langsung akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (BSN, 2023).

Standar Nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat (SNI 8152:2015) mencakup beberapa aspek penting, termasuk persyaratan umum yang meliputi lokasi, kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan dokumen legal. Selain itu, terdapat persyaratan teknis yang mengatur ruang dagang dan pengelolaan limbah. SNI ini juga menetapkan persyaratan pengelolaan yang mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk sumber daya manusia, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan berkelanjutan, serta pemantauan mutu dan keamanan komoditas (BSN, 2023). SNI 8152:2021 mendefinisikan pasar rakyat sebagai pasar tetap yang terdiri dari toko, kios, los, atau bentuk lain dengan pengelolaan tertentu untuk transaksi jual beli dengan sistem tawar-menawar. SNI ini tidak berlaku untuk pasar yang menjual komoditas khusus (pasar tematik), seperti pasar hewan, pasar bunga, dan sejenisnya. SNI 8152:2021 menetapkan tiga persyaratan utama untuk pasar rakyat :

1. Persyaratan Umum, yang memastikan bahwa semua dokumen legalitas, seperti izin dan dokumen hukum, tersedia dan sah. Lokasi pasar juga harus strategis dan mudah diakses oleh pengunjung. Selain itu, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar sangatlah penting, serta menjamin keamanan dan kenyamanan bagi semua pengunjung dan pedagang.
2. Persyaratan Teknis, pasar harus menyediakan ruang dagang yang memadai untuk kegiatan jual beli. Aksesibilitas dan zonasi juga perlu diperhatikan, termasuk area parkir, area bongkar muat, koridor atau gangway, serta pos ukur ulang. Fasilitas umum yang diperlukan mencakup kantor pengelola, toilet, ruang ASI, CCTV, ruang peribadatan, area serbaguna, pos kesehatan, pos keamanan, area merokok, ruang sanitasi, dan area penghijauan. Elemen bangunan harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, dengan pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Selain itu, sistem drainase yang efektif serta ketersediaan air bersih harus dipastikan. Pengelolaan air limbah dan sampah juga harus dilakukan secara baik, serta dukungan terhadap sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong digitalisasi pasar rakyat.
3. Persyaratan Pengelolaan, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi pengelola pasar agar pengelolaan berjalan dengan baik. Prosedur kerja pengelola juga harus diatur dengan jelas untuk memastikan efisiensi operasional. Struktur organisasi pengelola pasar perlu ditentukan agar

semua pihak memahami peran masing-masing. Terakhir, pemberdayaan pedagang sangat penting untuk melibatkan mereka dalam proses pengelolaan pasar sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka terhadap keberlangsungan pasar.

Secara keseluruhan, SNI 8152:2021 bertujuan untuk menjamin kualitas Pasar rakyat agar memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, fasilitas yang memadai, serta tata kelola yang baik. Penerapan SNI Pasar Rakyat ini tidak hanya menguntungkan para Pedagang, tetapi juga konsumen. Hal ini dikarenakan SNI ini menekankan faktor-faktor penting seperti kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dalam pengelolaan Pasar rakyat. Dengan terpenuhinya standar ini, maka kedua belah pihak, baik Pedagang maupun konsumen, akan mendapatkan manfaat dari lingkungan Pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman (Mastan, 2022).

Tiga Pasar di Kabupaten Rembang diajukan untuk mendapatkan status Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketiga Pasar yang diusulkan tersebut adalah Pasar Kragan, Pasar Kreatif Lasem, dan Pasar Tegaldowo yang terletak di Kecamatan Gunem. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa mendapatkan sertifikasi SNI diambil dengan tujuan agar masyarakat yang berbelanja di Pasar-Pasar tersebut dapat memperoleh layanan yang baik. Mahfudz menjelaskan, "Kami mendorong Pasar-Pasar tersebut untuk mengikuti atau memenuhi persyaratan akurasi agar dapat menjadi Pasar bersertifikat SNI."

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasar yang ingin mendapatkan label SNI, yaitu persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan. Persyaratan umum mencakup pemenuhan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Mahfudz menjelaskan bahwa Pasar Kragan sudah memiliki infrastruktur yang baik dan zonasi yang teratur, namun masih perlu peningkatan dalam hal kebersihan dan drainase. Selain itu, ketertiban, pemberdayaan Pedagang, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan ruang laktasi juga perlu diperhatikan. Dia menekankan bahwa Pasar SNI bukan hanya tentang infrastruktur yang mahal, tetapi juga tentang penyediaan fasilitas pendukung dan edukasi kepada Pedagang untuk menjaga kebersihan. Status Pasar SNI sangat penting untuk kenyamanan konsumen dan Pedagang. Di Kabupaten Rembang, baru Pasar Sumber yang mendapatkan status SNI, dan baru tiga Pasar yang diajukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (Mifta Rembang Kominfo, 2024).

Hanya 1 dari 15 Pasar tradisional Kabupaten Rembang yang memiliki status SNI. Pasar Tradisional Sumber secara resmi mendapatkan sertifikat SNI pada tahun 2023. Pada Rabu (27/12/2023), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Ratna Kawuri, menyerahkan sertifikat SNI di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah M. Mahfudz, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang, menyatakan bahwa Pasar yang bersertifikat SNI adalah bagian dari upaya pemerintah untuk

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam hal penyediaan fasilitas Pasar. Sertifikasi SNI ini menunjukkan bahwa standar keamanan, ketertiban, kebersihan, fasilitas MCK, drainase, dan kesehatan telah terpenuhi (Biro Rembang, 2023).

Pasar Sumber dikenal karena kebersihan dan keteraturannya, dengan zonasi yang memisahkan Pedagang makanan basah, makanan kering, dan pakaian. Pengelola Pasar menyediakan ruang kesehatan, ruang laktasi untuk ibu menyusui, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Pasar ini dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), fasilitas MCK yang bersih, penerangan yang memadai, dan keamanan yang baik. Menurut Mahfudz, Pasar SNI bukan hanya tentang infrastruktur yang mahal, tetapi lebih pada penyediaan fasilitas pendukung dan edukasi kepada Pedagang untuk menjaga kebersihan. Dia berharap Pasar-Pasar desa lainnya, seperti yang baru dibangun di Gunem, Tegaldowo, Pandangan, Kragan, Sarang, dan Sedan, dapat mengikuti jejak Pasar Tradisional Desa Sumber menuju sertifikasi SNI. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya pengelolaan internal Pasar yang kurang optimal sehingga belum ada menyentuh setengah dari jumlah Pasar yang berstandar SNI di Kabupaten Rembang. Pengelolaan Pasar tradisional meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap Pasar tradisional. Oleh karena itu, pengembangan Pasar tradisional baik secara fisik maupun non-fisik selalu dilakukan agar dapat terus bersaing dengan Pasar-Pasar modern yang ada saat ini. Selain itu, perbaikan Pasar tradisional di Indonesia juga diperlukan

agar eksistensi Pasar tradisional tidak menurun dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat akibat kehadiran Pasar modern yang menawarkan kondisi dan fasilitas yang lebih baik. Pengembangan Pasar tradisional tersebut membutuhkan adanya kinerja organisasi Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM untuk berperan aktif dan berperan secara komprehensif. Dengan demikian, kinerja organisasi ini sangat penting dalam upaya melaksanakan perbaikan Pasar tradisional di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Rembang, terdapat 15 unit Pasar tradisional yang terbagi menjadi tiga kelas atau rayon. Namun, kondisi fisik bangunan Pasar-Pasar tradisional di Kabupaten Rembang masih banyak yang kurang baik. Selain itu, kondisi Pasar yang kotor dan belum tertata dengan rapi juga menjadi permasalahan yang perlu ditangani. Secara umum, Pasar-Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Rembang masih mengalami kendala dalam hal kondisi fisik bangunan serta kebersihan dan tata kelola yang belum optimal.

Gambar 1. 1
Kondisi Fisik Pasar Tradisional Kabupaten Rembang



Sumber: (Ilham Akbar, 2022)



Sumber: (Ilyas al-Musthofa, 2022)



Sumber: (Lingkarjateng.id, 2024)

Tabel 1. 2**Kondisi Bangunan Pasar Tradisional Kabupaten Rembang Tahun 2024**

Nama Pasar	Kondisi Pasar	Status SNI
Pasar Kota Rembang	Kurang Baik	Belum
Pasar Magersari	Kurang Baik	Belum
Pasar Sulang	Cukup Baik	Belum
Pasar Sumber	Baik	Sudah
Pasar Lasem	Cukup Baik	Belum
Pasar Kreatif Lasem	Baik	Belum
Pasar Pamotan	Cukup Baik	Belum
Pasar Jolotundo	Cukup Baik	Belum
Pasar Kragan	Baik	Belum
Pasar Sarang	Baik	Belum
Pasar Tegaldowo	Baik	Belum
Pasar Gandri	Cukup Baik	Belum
Pasar Sedan	Baik	Belum
Pasar Pandangan	Baik	Belum
Pasar Wonokerto	Baik	Belum

Sumber: Indagkop UKM Kabupaten Rembang

KH. Ahmad Mustofa Bisri, yang lebih dikenal sebagai Gus Mus adalah seorang tokoh agama berpengaruh di Rembang, mengkritik Pemerintah Kabupaten Rembang. Saat berbelanja di Pasar Rembang, Gus Mus menyampaikan bahwa Pasar tersebut tidak menunjukkan banyak perubahan, kecuali menjadi lebih ramai dan semrawut. Menurut nya,

Pemerintah Kabupaten Rembang belum melakukan penataan yang memadai, sehingga kondisi Pasar tetap tidak membaik (Mukhammad Fadlil, 2024).

Tabel 1. 3

Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Rembang Tahun 2024

No.	Nama Pasar	Jumlah Pedagang
1	Pasar Rembang	1.665
2	Pasar Magersari	30
3	Pasar Sulang	244
4	Pasar Sumber	192
5	Pasar Lasem	1.035
6	Pasar Kreatif/Babagan Lasem	164
7	Pasar Jolotundo	128
8	Pasar Pamotan	851
9	Pasar Tegaldowo	300
10	Pasar Pandangan	335
11	Pasar Kragan	168
12	Pasar Sedan	438
13	Pasar Gandrirojo	51
14	Pasar Sarang	657
15	Pasar Wonokerto	50

Sumber: Dindagkop UKM Kabupaten Rembang

Para Pedagang di Pasar tradisional berhak mendapatkan tempat penjualan yang layak. Namun, Bidang Pasar belum dapat menerapkan manajemen pengelolaan yang maksimal terkait tata kelola pedagang di Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Rembang , sehingga menimbulkan permasalahan lahan bagi Pedagang, terbukti masih banyaknya Pedagang

yang berjualan di luar Pasar sehingga menimbulkan permasalahan lahan di Pasar bagi Pedagang yang ada akibat penuhnya kapasitas Pasar yang ada. Jumlah Pedagang tradisional yang ada di Pasar-Pasar tradisional Kabupaten Rembang cukup banyak. Dengan jumlah Pedagang yang cukup banyak berjumlah secara keseluruhan mencapai 6.038 Pedagang, seharusnya manajemen penataan lahan berjualan di Pasar dapat dilakukan dengan baik agar tercipta kenyamanan dan ketertiban dalam Pasar tradisional itu sendiri. Tetapi, menurut pernyataan Kepala Bidang Pasar Kabupaten Rembang, manajemen penataan lahan bagi Pedagang masih menghadapi banyak kendala.

Data menunjukkan jumlah Pedagang di Pasar tradisional Kabupaten Rembang cukup banyak dan terus bertambah setiap waktu karena jumlah Pedagang di Pasar tradisional tidak menentu. Hal itu karena terdapat banyak pedagang sementara yang tidak termasuk dalam statistik jumlah pedagang pasar tradisional. Jumlah Pedagang yang cukup banyak pasti memerlukan tempat yang layak untuk berjualan, namun hal tersebut belum dapat teratasi dengan baik. Dengan jumlah Pedagang yang semakin bertambah, maka masalah yang timbul juga pasti akan bertambah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari Bidang Pasar untuk mengatasi permasalahan lahan bagi Pedagang ini. Apabila masalah lahan tidak dapat dikelola dengan manajemen yang baik, sedangkan jumlah Pedagang setiap waktu selalu meningkat, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kenyamanan Pedagang maupun Pembeli itu sendiri.

Dari segi pemeliharaan fasilitas belum adanya renovasi yang signifikan secara menyeluruh Pasar di Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan penataan di delapan pasar tradisional sepanjang tahun 2022. Termasuk dalam penataan tersebut adalah Los Pasar Ikan Lasem, Sarang, Pandangan, Gandrirojo Sedan, Pamotan, Sedan, dan Sumber. Pada tahun 2023, pasar tradisional akan tetap menjadi tempat yang menyenangkan. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Rembang akan melakukan pembangunan atau revitalisasi di 9 Pasar tradisional lainnya, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Pasar-Pasar tersebut. Penataan Pasar tradisional di Kabupaten Rembang dapat terlaksana berkat adanya retribusi yang dibayarkan oleh para Pedagang Pasar. Retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk manfaat bagi warga melalui penataan dan perbaikan Pasar. Ahmad Duri, seorang Pedagang di Pasar Kragan, merasa senang dengan kios baru yang ia tempati hasil dari penataan tersebut. Ia berharap kios baru ini akan meningkatkan penjualannya. Para Pedagang merasa bersyukur dengan bangunan baru ini dan berharap diberi ketentraman, kelancaran usaha, dan keuntungan yang melimpah, meskipun masih ada beberapa perbaikan yang diperlukan pada saluran dan paving. Rumisih, warga Desa Karanglincak Kragan yang sering berbelanja di Pasar Kragan, juga merasa senang dengan penataan Pasar. Ia merasa tempatnya menjadi lebih nyaman dan berharap berbelanja menjadi lebih cepat, nyaman, dan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa renovasi dan

perbaikan Pasar sejalan dengan kelancaran pembayaran retribusi Pasar, selain dari dana pemerintah seperti APBD (Redaksi Halo Semarang, 2023).

Rencana pemindahan Pasar Kota Rembang di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Hafidz kemungkinan besar akan gagal. Anggaran untuk relokasi tersebut tidak ada dalam APBN 2024, dan Ketua Paguyuban Pasar Rembang, Sutono, mengonfirmasi pembatalan anggaran relokasi dari pemerintah pusat. Para pedagang menyambut baik keputusan ini, lebih memilih renovasi pasar di lokasi saat ini, terutama untuk memperbaiki saluran drainase yang sering macet dan menyebabkan banjir. Mereka berharap agar pasar direnovasi, bukan dipindahkan ke bekas Pasar Hewan di Desa Sumberjo (Ilyas al-Musthofa, 2024).

Selain tentang terbatasnya dana dari Pemerintah sebagai penyebab kurangnya pemeliharaan Pasar di Kabupaten Rembang, terhambatnya pemeliharaan tersebut juga disebabkan oleh sistem retribusi dari pedagang yang kurang optimal dan sering mengalami tunggakan. Hal tersebut juga berdampak langsung pada PAD yang mana akan menghambat pembangunan fasilitas daerah dalam hal ini yaitu pengelolaan Pasar di Kabupaten Rembang. Tunggakan ini terjadi saat diterapkannya e-retribusi dalam kasus ini terjadi di Pasar Kota Rembang.

Tabel 1. 4

Daftar Tunggakan e-Retribusi Pasar Kota Rembang Tahun 2018-2022

Tahun	Retribusi	
	Pelayanan Pasar (Tunggakan)	Pelayanan Sampah (Tunggakan)
2018	1.230.000,00	1.968.000,00
2019	12.474.000,00	6.810.000,00
2020	34.164.000,00	15.195.000,00
2021	128.425.500,00	35.250.000,00
2022	240.939.000,00	60.195.000,00
Jumlah	417.232.500,00	119.418.000,00

Sumber: Laporan Tunggakan e-Retribusi Pasar Kota Rembang

Salah satu program kerja kepemimpinan Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Bupati M Hanies Cholil Barro' (Gus Hanies) adalah pengelolaan Pasar tradisional secara lebih baik. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Hanies saat berkunjung ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dinindagkop UKM) Rembang pada Jumat (21/1/2022).

Gus Hanies menekankan bahwa Dinindagkop UKM perlu lebih cepat dan efisien dalam mengelola Pasar, terutama dalam hal retribusi, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, masih banyak kebocoran dalam pengelolaan retribusi Pasar tradisional. Kepala

Dinindagkop UKM Rembang, Mochammad Mahfud, merespons dengan berencana mengoptimalkan penerimaan retribusi Pasar melalui peningkatan penggunaan e-Retribusi di beberapa Pasar. Saat ini, hanya tiga Pasar yang sudah menerapkan e-Retribusi, yaitu Pasar Rembang, Lasem, dan Sarang. Tahun ini, mereka berencana untuk menerapkan e-Retribusi di lima Pasar tambahan, sehingga totalnya menjadi delapan Pasar.

Mahfud akan menegur Pedagang yang membiarkan kios atau los mereka tidak digunakan. Jika teguran tersebut tidak dipindahkan, kios tersebut akan dialihkan kepada Pedagang lain yang memiliki Kartu Anggota Dagang (Kartadag). Mahfud menegaskan bahwa kios yang tidak digunakan akan diidentifikasi dan diberikan teguran. Jika Pedagang tidak mau berdagang, kios tersebut akan ditarik karena berkaitan dengan retribusi (Aba Tabisa, 2022).

Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Cabang Rembang menerapkan Program e-Retribusi Pasar untuk mengatasi masalah pencatatan manual yang memungkinkan kesalahan atau kecurangan, serta kesulitan dalam memantau penarikan dan pelaporan dana retribusi. Kerja sama ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 510/0018/2018. Meskipun demikian, evaluasi diperlukan karena pelaksanaan pungutan retribusi berbasis non-tunai masih menghadapi kendala. Sesuai Pasal 6 dalam PKS, perjanjian ini berlaku selama 5 tahun (2018-2023) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan setelah evaluasi pelaksanaan kerja sama. Program

e-Retribusi Pasar ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi, serta memberikan kemudahan kepada pedagang dalam membayar retribusi (Febriani, 2023).

Tabel 1. 5
Tunggakan Retribusi Pasar Kabupaten Rembang

No.	Nama Pasar	Tunggakan Retribusi
1	Pasar Rembang	440.412.750
2	Pasar Magersari	22.586.000
3	Pasar Sulang	467.040
4	Pasar Sumber	-
5	Pasar Lasem	184.021.826
6	Pasar Kreatif/Babagan Lasem	9.747.000
7	Pasar Jolotundo	324.000
8	Pasar Pamotan	44.466.500
9	Pasar Tegaldowo	-
10	Pasar Pandangan	6.856.500
11	Pasar Kragan	3.384.000
12	Pasar Sedan	21.744.000
13	Pasar Gandrirojo	-
14	Pasar Sarang	199.671.870
15	Pasar Wonokerto	-

Sumber: Dindagkop UKM Kab. Rembang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 15 Pasar umum tradisional yang ada di Kabupaten Rembang hanya terdapat 4 Pasar yang tidak memiliki tunggakan dalam pembayaran retribusi. Hal tersebut

disebabkan oleh sistem e-retribusi yang masih terkendala pada jaringan yang sering *error*. Tunggakan retribusi terbesar terdapat di Pasar Kota Rembang, Pasar Sarang, Pasar Lasem, Pasar Pamotan, Pasar Magersari, Pasar Sedan yang mana Pasar-Pasar tersebut memiliki tunggakan retribusi melebihi dari 10 juta rupiah, sedangkan Pasar yang memiliki tunggakan retribusi kurang dari 10 juta yaitu Pasar Kreatif Lasem, Pasar Pandangan, Pasar Kragan, Pasar Sulang, dan Pasar Jolotundo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat Pedagang Pasar di Kabupaten Rembang yang belum tuntas dalam membayar retribusi Pasar dan hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya proses renovasi maupun pembangunan fisik Pasar itu sendiri.

Di beberapa lokasi, seperti Pasar Rembang, terdapat poster-poster yang dipasang di pintu masuk utama Pasar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan retribusi. Poster-poster ini menyuarakan penolakan Pedagang Pasar terhadap kenaikan tarif retribusi di tengah situasi ekonomi yang sulit. Juremi, yang mewakili Paguyuban Pasar Pamotan, menginformasikan bahwa sekitar 100 Pedagang penyewa kios di Pasar Pamotan menentang kenaikan retribusi. Dari sekitar 700 penyewa los, sekitar setengahnya juga menyatakan ketidaksetujuan mereka. Menurut Juremi, kenaikan retribusi dianggap tidak sesuai dengan kondisi Pasar yang sedang lesu. Ia menambahkan bahwa kenaikan retribusi untuk penyewa kios hampir mencapai dua kali lipat dari tarif sebelumnya. Hasil pertemuan yang diselenggarakan oleh para Pedagang menunjukkan penolakan secara bulat

terhadap kenaikan tersebut. Alasan utama penolakan adalah kondisi Pasar yang sedang sepi dan persaingan yang semakin ketat dengan model penjualan *online* (Ilyas al-Musthofa, 2024).

Gambar 1. 2

Penolakan Kenaikan Tarif Retribusi Pasar Tradisional Kabupaten Rembang



Sumber: Artikel Suara Merdeka Muria

Melalui Asosiasi Paguyuban Pedagang Indonesia (APSI), mereka telah mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD Rembang mengenai penolakan retribusi yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2024. Juremi mengeluhkan bahwa kenaikan retribusi ini diumumkan tanpa sosialisasi sebelumnya, dengan pedagang menerima pemberitahuan mendadak pada pertengahan Januari 2024. Ia menambahkan bahwa mereka telah mengadakan musyawarah dengan paguyuban pedagang dari berbagai pasar tradisional di Kabupaten Rembang dan sepakat menolak kenaikan tersebut. Sementara itu, Kabid Pasar Dindagkop UKM Rembang, Heri Martono, menyatakan bahwa sosialisasi kepada pedagang telah dilakukan secara menyeluruh (Ilyas al-Musthofa, 2024).

Gambaran kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi Pasar masih menghadapi tantangan, terutama terkait tunggakan dan optimalisasi potensi retribusi dari los/kios yang seharusnya menghasilkan pendapatan bagi daerah. Oleh karena itu, upaya perbaikan pengelolaan seperti yang direncanakan pemerintah daerah menjadi penting untuk dilakukan. Penulis memahami bahwa kondisi fisik Pasar-Pasar tradisional di Kabupaten Rembang yang rata-rata masih kurang baik memerlukan perbaikan secara menyeluruh agar dapat memberikan kenyamanan bagi para penjual maupun Pembeli di Pasar. Beberapa poin penting yang dapat di garis bawahi:

1. Perbaikan kondisi fisik Pasar tradisional secara menyeluruh sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi Pedagang dan Pembeli.
2. Apabila kenyamanan bagi penjual dan Pembeli dapat diciptakan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan minat/daya tarik Pasar tradisional.
3. Jika masyarakat merasa Pasar tradisional merupakan Pasar yang nyaman, aman, tertib dan bersih, minat dan daya beli masyarakat ke Pasar tradisional juga akan meningkat.
4. Peningkatan minat dan daya beli masyarakat ke Pasar tradisional merupakan suatu hal yang sangat penting dan diharapkan.

Secara keseluruhan dari paparan latar belakang terkait aspek kinerja organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang

pada Bidang Pasar masih terdapat berbagai masalah diantaranya pada aspek representasi jumlah Pasar tradisional yang belum efisien terutama untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang disebabkan karena kurangnya anggaran APBD yang tersedia sehingga berpengaruh pada citra kinerja organisasi pada Bidang Pasar yang belum sepenuhnya optimal. Lalu pada segi kualitas, produktivitas, dan kesiagaan Pegawai juga belum efektif dibuktikan dengan kualitas pengelolaan dan penataan Pasar di Kabupaten Rembang yang belum memenuhi kriteria SNI. dari 15 Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Rembang hanya terdapat 1 Pasar tradisional yang berlabel SNI. Selain itu pelayanan publik yang disediakan pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang belum sepenuhnya adil dilihat dari ketercukupan ataupun kepantasan bangunan serta penyediaan lahan bagi para Pedagang di Pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya mencapai 100% sehingga menghambat juga dalam segi pendapatan Pedagang yang mana konsumen lebih memilih membeli bahan pokok kebutuhan di toko *online* dikarenakan keadaan dan kondisi Pasar yang tergolong kumuh dan Pedagang yang tidak teratur. Lalu sebab dari kinerja organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor sistem informasi manajemen yang kurang optimal dinilai dari segi kualitas sistem E-Retribusi yang masih sering *error* sehingga kualitas informasi pembayaran retribusi secara *online* menjadi tidak berkualitas akibatnya proses pembayaran retribusi menjadi

terhambat. Lalu faktor kedua yaitu Kebijakan Pengelola yang kurang memiliki inovasi yang cermat hal ini dibuktikan program E-Retribusi yang dijalankan masih terdapat kendala kebocoran data yang diterapkan pada Pasar tradisional Kabupaten Rembang, lalu juga belum semua Pasar tradisional di Kabupaten Rembang menerapkan sistem E-Retribusi ini dikarenakan Pedagang yang belum memahami sistematika program tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya terfokus pada faktor-faktor internal organisasi dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga melihat bagaimana kinerja organisasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kepuasan seperti yang diinginkan masyarakat. Penulis berasumsi bahwa dalam menjalankan tugasnya, organisasi publik seharusnya menjadikan masyarakat sebagai tujuan utama karena organisasi publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Faktor internal dalam organisasi publik memang penting terhadap kinerja organisasi itu sendiri, namun tidak boleh mengabaikan kepuasan masyarakat. Penting untuk diperhatikan apakah kinerja organisasi telah memberikan dampak dan manfaat yang luas bagi masyarakat atau hanya memberikan dampak dan manfaat yang baik untuk organisasi saja. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA ORGANISASI BIDANG PASAR DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM, KABUPATEN REMBANG”**.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, ringkasan dalam 5 poin utama terkait masalah kinerja organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang pada Bidang Pasar adalah sebagai berikut:

1. Keadaan pasar yang belum memadai dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang karena terbatasnya anggaran.
2. Kualitas pengelolaan pasar belum efektif, dibuktikan dengan hanya 1 dari 15 Pasar tradisional yang memenuhi kriteria SNI.
3. Pelayanan publik pada Bidang Pasar belum sepenuhnya adil, dilihat dari ketidakcukupan dan ketidakpantasan bangunan serta penyediaan lahan bagi Pedagang di Pasar tradisional.
4. Sistem informasi manajemen kurang optimal, terlihat dari kualitas sistem E-Retribusi yang sering *error* sehingga menghambat proses pembayaran retribusi secara *online*.
5. Kebijakan Pengelola kurang memiliki inovasi yang cermat, dibuktikan dengan adanya kendala kebocoran data pada program E-Retribusi dan belum semua Pasar tradisional menerapkannya karena kurangnya pemahaman Pedagang.

1.2.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu hal yang digunakan oleh penulis untuk membatasi ruang lingkup pemikiran agar permasalahan yang dibahas dapat difokuskan. Oleh karena itu, perumusan masalah perlu dilakukan guna menentukan faktor-faktor dari penelitian yang ingin dikaji. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka objek yang ingin diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang?
2. Apa Faktor Penghambat Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kinerja organisasi pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang
2. Untuk menganalisis faktor penghambat kinerja organisasi pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, termasuk penulis, institusi Universitas, Pemerintah Kabupaten Rembang, serta masyarakat umum.

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai praktik pemberdayaan masyarakat.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini.

3) Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi serta UKM di daerah tersebut..

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.5. Kerangka Penelitian/Konsep

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1.	Andu, 2023 (Jurnal Governance)	Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani gelandangan dan pengemis. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori Kumorotomo (1996), yang menyediakan pedoman untuk menilai kinerja birokrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta program bantuan belum berjalan secara optimal. Faktor penyebabnya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan, terutama

			akibat dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada beberapa organisasi publik, termasuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Manado.
2.	Dewi, 2024 (Ethics and Law Journal: Business and Notary)	Analisis Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Pasca Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional	Studi ini menyelidiki kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali setelah perubahan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap adalah empat metrik

			yang digunakan untuk melakukan analisis kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek masing-masing indikator telah dilaksanakan dengan baik. Namun, ada beberapa indikator yang belum dioptimalkan karena banyak karyawan belum mengikuti pelatihan atau uji kompetensi, yang memengaruhi kemampuan mereka di tim kerja. Selain itu, kebijakan penyederhanaan birokrasi tampaknya hanya merupakan perubahan struktural yang tidak memiliki dampak yang signifikan. Rekomendasi termasuk mempercepat proses pelatihan dan uji kompetensi karyawan dan mengoptimalkan pelaksanaan.
--	--	--	---

3.	Saputri et al, 2019 (E-Journal Undip)	Analisis Kinerja Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan menemukan elemen-elemen yang membantu atau menghalangi pencapaian visi organisasi. Efektivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas adalah empat komponen yang digunakan untuk menilai kinerja. Sumber daya manusia, kerja sama staf, dan infrastruktur adalah beberapa komponen yang mempengaruhi kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
----	---	--	--

			belum optimal. Banyak tujuan yang belum tercapai, layanan masyarakat yang tertunda, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana, dan kekurangan fasilitas dan infrastruktur. Oleh karena itu, jelas bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang masih kurang baik.
4.	Kusuma, 2021 (Jurnal Moderat)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan (Studi pada Kinerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kinerja organisasi Soesilo (2014). Struktur organisasi, kebijakan pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), sistem informasi manajemen, dan sarana dan prasarana adalah semua komponen teori ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korwilcambidik Kutawaluya tidak memenuhi

		Sekolah Dasar Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang)	persyaratan pelayanan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Ini ditunjukkan oleh ketidakmampuan aparatur untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka. Selain itu, data yang tepat tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang sebenarnya di 26 Sekolah Dasar (SD) belum konsisten. Prinsip "orang yang tepat di tempat yang tepat" tidak diterapkan dengan baik dalam organisasi, dan karyawan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena
--	--	---	--

			kurangnya kendaraan operasional.
5.	Yudha Bramantyo, 2019 (Jurnal Transparansi Hukum)	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi	Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja suatu organisasi. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan tertentu, seorang pemimpin dapat mengarahkan organisasi dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Gaya kepemimpinan yang efektif memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) berlandaskan kesadaran, nilai-nilai normatif, etika, kebebasan, kepercayaan, pengawasan, serta keterbukaan terhadap kritik dan saran yang konstruktif, ketegasan, dan penghargaan terhadap kreativitas serta

			inovasi; (2) berdampak positif pada peningkatan kinerja, termasuk dalam aspek kompetensi profesional, kompetensi pribadi, dan keterampilan sosial. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang tidak efektif ditandai dengan kurangnya rencana kerja yang jelas, kesulitan dalam menerima masukan, ketidakpahaman terhadap tugas yang harus dilaksanakan, serta sering kali menyebabkan ketidakjelasan dalam pekerjaan. Hal ini dapat menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis, rendahnya disiplin, motivasi yang minim, dan kurangnya kontrol atau pengawasan.
--	--	--	--

6.	Herlina Mustari et al., n.d. 2024 <i>(Journal of Economic, Business and Accounting)</i>	Pengaruh Diversitas Dan Inklusi Terhadap Kinerja Organisasi	Dampak keberagaman dan inklusi dalam konteks organisasi kini menjadi fokus utama dalam dunia bisnis. Dengan kompleksitas lingkungan bisnis yang semakin meningkat dan beragamnya tuntutan pasar, perusahaan dituntut untuk lebih memahami, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman di antara karyawan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberagaman dan inklusi terhadap kinerja organisasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis terhadap isu-isu yang ada, tujuan, hasil, dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa manajemen
----	---	--	---

			keberagaman dan inklusi memandang perbedaan antar individu sebagai aset berharga yang seharusnya dimanfaatkan secara bijaksana.
7.	Pahira & Rinaldy, 2023 (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi	Model analisis interaktif yang diciptakan oleh Miles dan Huberman digunakan untuk menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara interaktif dan terus menerus sampai titik jenuh. Menurut penelitian, manajemen sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam hal bisnis dan manajemen.

			Manajemen SDM dapat membangun lingkungan kerja yang efektif dan memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang produktif dan berkualitas tinggi. Manajemen SDM juga dapat membantu menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan motivasi karyawan, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan.
8.	Aina & Atan, 2020 (MDPI)	<i>The Impact of Implementing Talent Management Practices on Sustainable Organizational Performance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menarik dan mempertahankan talenta tidak berdampak pada kinerja organisasi berkelanjutan, sedangkan pembelajaran, pengembangan, dan manajemen karir memberikan dampak positif yang signifikan. Studi ini menyarankan bahwa

			manajemen harus memanfaatkan pembelajaran dan pengembangan serta manajemen karir karyawan, dengan fokus pada program pembinaan dan pelatihan serta rotasi pekerjaan untuk memungkinkan perusahaan mencapai kinerja organisasi yang berkelanjutan.
9.	Anwar & Abdullah, n.d. 2021 (International journal of Engineering, Business and Management)	<i>The impact of Human resource management practice on Organizational performance</i>	Penelitian ini menyelidiki dampak manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam situasi ekonomi yang cepat berubah, yang ditandai oleh fenomena seperti globalisasi, peningkatan tuntutan dari investor dan pelanggan, serta persaingan produk yang ketat, lembaga pemerintah berupaya meningkatkan kinerjanya

			dengan cara menekan biaya, memperbarui produk dan proses, serta meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan bertahan. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif dengan melibatkan 240 responden sebagai sampel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis ditolak, kecuali hipotesis kelima, yang menyatakan bahwa "desentralisasi memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi.
10.	Halid et al., 2020 (Atlantis Press)	<i>The Relationship Between Digital</i>	Penelitian ini mengulas beberapa penelitian dan

		<i>Human Resource Management and Organizational Performance</i>	menganalisis konsep dan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia digital. Penelitian ini sebagian besar didasarkan pada data sekunder saja. Wawasan ini penting bagi organisasi untuk membantu mereka menerapkan manajemen tenaga kerja digital secara efektif guna meningkatkan kinerja mereka. Lebih lanjut, temuan ini akan membantu peneliti dengan memberikan dasar untuk memahami dampak sumber daya manusia digital terhadap kinerja organisasi.
--	--	---	--

Tabel berikut menunjukkan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang, yang dimaksudkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu:

a. Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani gelandangan dan pengemis. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori Kumorotomo (1996) yaitu efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap, yang menyediakan pedoman untuk menilai kinerja birokrasi publik. sedangkan penelitian yang saya gagas adalah analisis kinerja organisasi yang menitikberatkan pada aspek efisiensi, efektifitas dan keadilan untuk menilai keberhasilan kinerja dari organisasi publik pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang agar lebih optimal.

b. Analisis Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Pasca Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah berubah dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap adalah empat metrik yang digunakan untuk melakukan analisis kinerja. Apabila dibandingkan dengan penelitian

saya memang memiliki fokus tujuan yang sama namun jika dilihat dari segi dimensi terdapat perbedaan dan penelitian yang saya gagas hanya menjelaskan tentang faktor penghambat. Penelitian ini mempunyai fokus penelitian tentang kinerja organisasi dengan dimensi efisiensi, efektifitas, keadilan serta daya tanggap yang lebih cenderung kepada kinerja sedangkan penelitian saya berfokus pada aspek kinerja organisasi yang terdiri dari penilaian efisiensi, efektifitas dan keadilan yang bersifat general.

c. Analisis Kinerja Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara, penelitian ini mengumpulkan data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan menemukan elemen yang dapat membantu atau menghalangi pencapaian visi organisasi. Penelitian ini juga mengevaluasi kinerja organisasi dengan menggunakan indikator seperti efektivitas, kualitas layanan, daya tanggap, dan akuntabilitas. Sedangkan penelitian yang saya gagas adalah analisis kinerja organisasi yang menitikberatkan pada aspek efisiensi, efektifitas dan keadilan untuk menilai keberhasilan kinerja dari organisasi publik dan juga mengkaji faktor yang menjadi penghambat pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang agar lebih optimal.

- d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan (Studi pada Kinerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang)

Penelitian ini menggunakan analisis yang didasarkan pada teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Soesilo (2014). Teori ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu struktur organisasi, kebijakan pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), sistem informasi manajemen, serta sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan aspek aspek efisiensi, efektifitas dan keadilan untuk menilai keberhasilan kinerja dari organisasi publik pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang agar lebih optimal. Namun terdapat kesamaan dalam aspek teori yang peneliti gunakan dalam menilai faktor penghambat yaitu pada variabel kebijakan pengelolaan dan sistem informasi manajemen.

- e. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi

Penelitian ini berfokus pada permasalahan gaya kepemimpinan mempengaruhi keberhasilan dan peningkatan kinerja. Melalui gaya kepemimpinan, seorang pemimpin memimpin lembaga dan memotivasi Pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis terkait bagaimana kinerja organisasi dapat

menciptakan sebuah pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan apa saja faktor penghambat yang mempengaruhinya.

f. Pengaruh Diversitas Dan Inklusi Terhadap Kinerja Organisasi

Dalam dunia bisnis kontemporer, pengaruh keberagaman dan inklusi dalam organisasi telah menjadi perhatian utama. Perusahaan harus lebih memahami, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman di antara karyawan mereka karena tuntutan pasar global yang semakin kompleks dan beragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana keberagaman dan inklusi berdampak pada seberapa baik kinerja suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan studi literatur kualitatif. Berdasarkan analisis masalah, tujuan, hasil, dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa manajemen keberagaman dan inklusi melihat perbedaan antar individu sebagai sumber daya yang sangat berharga yang harus digunakan dengan bijak. Sementara itu, penelitian saya lebih fokus pada penilaian kinerja organisasi publik yang cenderung berorientasi pada sektor pemerintah, bukan sektor bisnis atau swasta. Aspek yang diteliti mencakup penilaian menyeluruh terhadap komponen kinerja organisasi serta pengkajian faktor-faktor penghambat yang menjadi isu utama dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

g. Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi

Studi telah menunjukkan bahwa, dalam hal bisnis dan manajemen, manajemen sumber daya manusia (SDM) sangat penting

untuk meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk membangun lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan semangat karyawan, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Manajemen sumber daya manusia dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif dengan mempertimbangkan elemen seperti kepemimpinan transformasional, pengembangan sumber daya manusia, manajemen keberagaman, dan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Hal ini memastikan bahwa perusahaan memiliki staf yang berkualitas dan berprestasi tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan bisnis, menjadi lebih kompetitif, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Sedangkan penelitian saya bukan hanya berfokus pada SDM dalam menilai kinerja organisasi melainkan dari segi hasil jangka panjang seperti efisiensi, efektivitas dan keadilan dan juga faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan yang tujuannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

h. The Impact of Implementing Talent Management Practices on Sustainable Organizational Performance

Studi ini menyarankan bahwa manajemen harus memanfaatkan pembelajaran dan pengembangan serta manajemen karir karyawan, dengan fokus pada program pembinaan dan pelatihan serta rotasi pekerjaan untuk memungkinkan perusahaan mencapai kinerja organisasi yang berkelanjutan. Sedangkan penelitian saya berfokus

kepada evaluasi penilaian dan perbaikan kepada kinerja organisasi pada sektor instansi pemerintah untuk dapat menyediakan sistem layanan yang optimal terhadap masyarakat dengan memperbaiki faktor yang penghambat.

i. The impact of Human resource management practice on Organizational performance

Penelitian ini mengkaji dampak manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam lingkungan ekonomi yang cepat berubah, yang ditandai oleh tren seperti globalisasi, meningkatnya permintaan dari investor dan pelanggan, serta persaingan produk yang ketat di pasar, lembaga pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan cara mengurangi biaya, memperbarui produk dan proses, serta meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan bertahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif untuk analisis, sementara penelitian saya menerapkan metode kualitatif deskriptif yang fokus pada analisis kinerja organisasi di sektor layanan publik, khususnya terkait penyediaan dan penataan pasar yang rapi dan bersih sesuai dengan standar SNI. Dalam hal ini, aspek yang mempengaruhi kinerja tidak hanya terbatas pada manajemen sumber daya manusia.

j. The Relationship Between Digital Human Resource Management and Organizational Performance

Penelitian ini mengulas beberapa penelitian dan menganalisis konsep dan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia digital.

Penelitian ini sebagian besar didasarkan pada data sekunder saja. Sedangkan penelitian saya berfokus pada kinerja organisasi pemerintahan dalam menyediakan layanan publik dengan metode kualitatif deskriptif dengan instrumen untuk mencari data yaitu wawancara, dan juga studi literatur serta observasi lapangan.

1.5.1. Administrasi Publik

Dikutip dari artikel Jurnal Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mina Piul dalam Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara (Bere et al., 2023), Secara etimologis, dua kata dalam bahasa Latin membentuk istilah "administrasi", "ad" yang berarti "menuju" atau "kepada", dan "ministrate" yang berarti "melayani" atau "memenuhi". A. Dunsire, yang dikutip oleh Keban, merujuk pada serangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan, pemerintahan, pelaksanaan, serta pengembangan prinsip-prinsip dalam kebijakan publik. Ini juga mencakup analisis, penyeimbangan, dan penyajian pertimbangan kebijakan, serta usaha individu dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan publik. Sementara itu, pengertian "publik" mengacu pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam cara berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang mereka anut.

Dikutip dari artikel jurnal yang berjudul Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Di Kota Semarang

(Zarkasyi Rahman, n.d.), Dalam Keban, Chandler dan Plano mengatakan, administrasi publik adalah proses mengatur dan mengorganisasikan personel dan sumber daya publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Selain itu, Keban menyatakan bahwa istilah administrasi publik mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator yang aktif atau agen tunggal yang memiliki kekuasaan dan selalu mengambil inisiatif untuk mengatur tindakan yang dianggap penting atau bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap pasif dan kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa pun yang diatur oleh pemerintah.

Namun, upaya untuk mendefinisikan fungsi umum yang dilakukan oleh pemimpin serta asas-asas yang membentuk praktik kepemimpinan yang baik dijelaskan dalam teori administrasi. Henry Fayol menggunakan pendekatan manajemen administrasi, yang melibatkan pendekatan dari tingkat pimpinan tertinggi hingga tingkat terbawah.

Dikutip dari artikel jurnal yang berjudul Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara (Basuki, 2021), administrasi publik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari sistem pengelolaan negara terkait dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Bidang ini selalu berhubungan dengan tiga cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Administrasi publik juga berkaitan erat dengan berbagai peraturan dan kebijakan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan,

serta etika dalam penyelenggaraan negara. Secara etimologis, istilah "administrasi publik" terdiri dari dua kata; "administrasi" yang merujuk pada kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, dan "publik" yang diartikan sebagai negara serta warga negara atau masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat demi mencapai tujuan yang bersifat umum.

Dikutip dari artikel jurnal yang berjudul Pengertian Administrasi Publik: Sifat, Ruang Lingkup, Fungsi, Tujuan, dan Teorinya (Veronika, 2021), ada beberapa definisi administrasi publik dari para ahli, antara lain: Marx mendefinisikannya sebagai tindakan untuk mencapai tujuan yang disadari dengan penataan sistematis dan penggunaan sumber daya; Frederic Lane mengartikannya sebagai pengorganisasian sumber daya manusia dan fisik untuk mencapai tujuan kelompok; L.D White menyebutnya sebagai semua operasi untuk memenuhi kebijakan publik; Woodrow Wilson menyebutnya sebagai penerapan hukum secara rinci dan sistematis; dan F.A Nigro menyebutnya sebagai upaya kelompok kooperatif dalam pengaturan publik yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta berinteraksi dengan swasta dalam pelayanan masyarakat.

Ruang lingkup administrasi publik terus berkembang seiring perubahan zaman. Dulu hanya menjaga hukum dan ketertiban serta pengumpulan pendapatan. Setelah revolusi industri, lingkungannya meluas ke bidang perdagangan, imperialisme, nasionalisme, dan internasionalisme.

Kini ditambah dengan kesadaran masyarakat akan hak dan hukum sehingga menuntut pelayanan publik yang lebih baik. Peran pentingnya adalah melaksanakan hukum dan kebijakan secara optimal serta bertindak sebagai *adjudicator*.

1.5.2. Paradigma Administrasi Publik

Dikutip dari artikel jurnal yang berjudul Teori Administrasi (Raja & Haji, 2023), Kajian dan praktik administrasi publik terus berkembang seiring dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh para administrator publik. Teoritisi menciptakan tiga perspektif utama dalam ilmu administrasi publik untuk menangani masalah ini. Mereka adalah Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Model Old Public Administration, atau Administrasi Publik Klasik, berfokus pada cara pemerintah menjalankan tugasnya secara demokratis, efisien, efektif, dan bebas dari kekuatan yang tidak perlu (Wilson, 1887). Fokus utama dari model ini adalah interaksi dan kerjasama hierarkis dalam organisasi pemerintah, di mana pemerintah memiliki peran dominan dalam merumuskan kebijakan serta menyediakan pelayanan publik. Dikutip dari artikel jurnal Teori Paradigma Administrasi (Sihotang, 2017), kemudian muncul inisiatif reformasi sektor publik yang berbasis pada paradigma Manajemen Publik Baru (NPM), yang diusulkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. NPM ingin birokrasi publik memenuhi standar manajemen yang baik, seperti kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong

partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, dan efisien (Minogue, 1998). Perspektif NPM dikritik karena prinsip-prinsip seperti produktivitas dan efisiensi dapat bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt (2003) membangun paradigma The New Public Service, yang mempromosikan hak warga negara yang setara. Menurut model ini, bukan elit politik yang menentukan kepentingan publik, tetapi diskusi tentang nilai-nilai masyarakat. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk bernegosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat dan komunitas. Meskipun New Public Service sangat ideal dari segi keadilan, hal ini sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia karena keterbatasan sumber daya, terutama yang berkaitan dengan dana. Akibatnya, kecenderungan saat ini adalah perwujudan paradigma New Public Management, di mana pemerintah memberikan pelayanan publik dengan syarat bahwa warga negara yang menggunakan layanan membayar.

Dikutip dari buku yang berjudul Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik (Anwaruddin, 2004), Nicholas Henry (2004) mengidentifikasi lima paradigma dalam perkembangan administrasi publik sebagai berikut:

berikut paradigma-paradigma dalam administrasi publik:

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini memisahkan tugas politik dan administrasi publik. Administrasi publik fokus pada organisasi, kepegawaian, dan anggaran, sementara politik menangani pemerintahan dan kebijakan. Administrator hanya mengimplementasikan kebijakan politisi secara efisien. Meski pemisahan ini masih diyakini, terdapat dilema karena administrator seringkali terlibat dalam pembuatan kebijakan. Leonard D. White menekankan pemisahan politik-administrasi dalam bukunya tahun 1926.

2. Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1950)

Fase ini menekankan prinsip administrasi universal yang dapat diterapkan di berbagai organisasi dan negara. Karya-karya penting seperti dari Follet, Willoughby, Fayol, dan Taylor muncul. Gulick dan Urwick memperkenalkan POSDCORB sebagai prinsip administrasi utama. Fokus lebih pada prinsip daripada lokus penerapannya.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Upaya menghubungkan kembali administrasi publik dengan ilmu politik. Studi kasus dan perbandingan administrasi berkembang. Dwight Waldo memprotes perlakuan ilmu politik terhadap administrasi publik yang dianggap sebagai "warga kelas dua".

4. Administrasi Publik sebagai Manajemen (1950-1970)

Beberapa ahli mencari alternatif dalam manajemen, menekankan efisiensi dan efektivitas terlepas dari konteks budaya atau institusi. Pendekatan ini mendorong peninjauan ulang makna "publik" dalam administrasi publik.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Administrasi publik berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, merambah teori organisasi, kebijakan publik, dan ekonomi politik. Asosiasi nasional administrasi publik terbentuk, dan program pendidikan MPA berkembang pesat.

6. Tata Kelola (Governance) (1990-sekarang)

Paradigma ini muncul akibat globalisasi, menekankan kolaborasi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta. Terbukti efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah sosial, namun juga menghadapi tantangan seperti "perang wilayah" dan proses yang memakan waktu. Keberhasilan tergantung pada komitmen, kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan SDM yang mumpuni.

1.5.3. Manajemen Publik

Dikutip dari Buku yang berjudul *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik* (Satibi, 2012), Konsep manajemen publik merupakan hasil penggabungan berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, dan ilmu politik, seperti yang dijelaskan oleh Overman dalam Keban (2004). Manajemen publik dapat didefinisikan sebagai pengelolaan sektor-sektor publik oleh institusi pemerintah, yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi, dan evaluasi terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi, serta sumber daya lainnya untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan manajemen publik diawali dengan pemikiran Woodrow Wilson (1887) yang menekankan pentingnya pemerintah sebagai organisasi, fungsi eksekutif, pencarian prinsip dan teknik manajemen efektif, serta metode perbandingan. Dikutip dari Nasir Mangangsing, kemudian muncul konsep The New Public Management pada 1990-an yang menekankan perhatian pada kinerja, fleksibilitas, penetapan tujuan dan target, komitmen politik, penglibatan pihak swasta, dan privatisasi (Pasolong, 2007; Vigoda dalam Sampara, 2000). Selanjutnya, lahir paradigma Reinventing Government oleh Osborne & Gaebler (1992) dan Osborne & Plastrik (1997) yang menekankan pemerintah sebagai katalis, dimiliki masyarakat, kompetitif, berorientasi misi, hasil, pelanggan, berwirausaha, antisipatif, desentralisasi, dan berorientasi Pasar. Paradigma terbaru adalah The New Public Service yang diperkenalkan oleh Denhardt & Denhardt (2003), yang menekankan pelayanan kepada warga negara bukan pelanggan, mencari kepentingan publik, menghargai kewarganegaraan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, akuntabilitas tidak sederhana, melayani bukan mengendalikan, serta menghargai manusia bukan hanya produktivitas. Esensi manajemen publik adalah upaya institusi publik (pemerintah) untuk mengelola sektor-sektor publik secara profesional dan proporsional melalui pemanfaatan sumber daya organisasi, sehingga mampu memberikan produk pelayanan prima sesuai kebutuhan masyarakat secara optimal.

1.5.4. Kinerja Organisasi

Dikutip dari jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Semarang (Firul, 2015), organisasi yang berhasil mencapai visi, misi, dan tujuannya disebut sebagai organisasi yang baik. Keberhasilan organisasi pasti didukung oleh kinerja yang optimal dari anggota stafnya. Kinerja didefinisikan oleh banyak ahli. Menurut Prof. Dr. Wibowo, SE (2013:7), kinerja berasal dari pengertian kinerja. Ada beberapa orang yang mengartikannya sebagai prestasi kerja atau hasil kerja. Namun, makna kinerja mencakup lebih dari hanya hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses pekerjaan dilakukan. Kinerja, menurut Moeheriono (2012:95), didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi, yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi.

Menurut Rummler dan Brache dalam jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora (Aditama & Widowati, 2017) terdapat tiga tingkatan kinerja dalam sebuah organisasi:

a) Kinerja Organisasi

Merupakan hasil yang dicapai oleh organisasi secara keseluruhan. Kinerja ini berhubungan dengan tujuan, struktur, dan pengelolaan organisasi.

b) Kinerja Proses

Merupakan kinerja yang terjadi pada setiap tahap dalam proses produksi atau penyampaian layanan. Kinerja ini dipengaruhi oleh tujuan, struktur, dan pengelolaan proses.

c) Kinerja Individu/Pekerjaan

Merupakan pencapaian atau efektivitas yang terlihat pada tingkat masing-masing pegawai atau pekerjaan. Kinerja ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, pengelolaan pekerjaan, serta karakteristik individu pegawai tersebut.

Dengan kata lain, kinerja dapat dilihat dari tiga level, yaitu organisasi secara keseluruhan, proses yang berlangsung di dalamnya, dan individu atau pekerjaan yang dilakukan oleh setiap Pegawai. Menurut Amitai Etzioni (Keban, 2008:227) kinerja organisasi mencerminkan sejauh mana suatu organisasi berhasil merealisasikan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Bastian (Tangkilisan, 2005:175) kinerja organisasi merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pelaksanaan setiap tugas yang diemban oleh organisasi tersebut untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja organisasi tidak hanya terbatas pada hasil atau tujuan yang dicapai, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan tugas serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Jadi, kinerja organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam melaksanakan seluruh tugasnya secara menyeluruh, baik dari segi hasil, proses, maupun

pemanfaatan sumber daya, untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.

McDonald dan Lawton mengajukan beberapa indikator untuk mengukur kinerja, antara lain throughput, efisiensi, dan efektivitas. Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut adalah:

a) Efisiensi

merujuk pada keadaan di mana terdapat perbandingan terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (keluaran) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kata lain, efisiensi menggambarkan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan *output* tertentu.

b) Efektivitas

mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik target jangka pendek maupun sasaran jangka panjang dan misi organisasi. Efektivitas menunjukkan sejauh mana organisasi mampu merealisasikan tujuan yang diharapkan.

Indikator kinerja menurut Salim dan Woodward:

a) Ekonomis (*economy*)

Mengacu pada penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya, terdapat upaya untuk meminimalkan penggunaan *input* atau masukan dalam rangka mencapai *output* tertentu.

b) Efisiensi (*efficiency*)

Merupakan kondisi tercapainya perbandingan terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (keluaran) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Efisiensi menggambarkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam menghasilkan *output*.

c) Efektivitas (*effectiveness*)

Merujuk pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik target jangka pendek, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi secara keseluruhan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana organisasi mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan.

d) Keadilan (*equity*)

Merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspek-aspek pemerataan, baik dalam penyediaan maupun pendistribusiannya kepada masyarakat.

Jadi, kinerja organisasi dapat diukur dari ekonomisasi penggunaan sumber daya, efisiensi *input-output*, efektivitas pencapaian tujuan, serta keadilan dan pemerataan dalam pelayanan publik. Sedangkan penjelasan kriteria penilaian kinerja organisasi pelayanan publik menurut Kumorotomo (1996) :

a) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam mendapatkan keuntungan, memanfaatkan faktor-faktor produksi, serta pertimbangan rasionalitas ekonomi. Kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan tolok ukur efisiensi yang relevan.

b) Efektivitas

Efektivitas mengacu pada tercapainya tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut. Hal ini terkait dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsinya sebagai agen pembangunan.

c) Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi. Kriteria ini berkaitan dengan ketercukupan atau kepantasan dalam memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Isu pemerataan pembangunan dan layanan bagi kelompok marginal dapat dijawab melalui kriteria ini.

d) Daya Tanggap

Berbeda dengan bisnis swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara/pemerintah terhadap kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, kinerja organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan untuk memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Dalam penelitian analisis kinerja organisasi di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang, tiga variabel utama yang dipilih adalah efisiensi, efektivitas, dan keadilan yang merupakan pendapat teori Kinerja Organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pemilihan masing-masing variabel tersebut:

a) Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks ini, efisiensi mencakup: Optimalisasi Sumber Daya: Efisiensi menggambarkan seberapa baik organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, dana, dan waktu, untuk menghasilkan output yang maksimal. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Pengukuran Kinerja: Efisiensi dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pelayanan publik

b) Efektivitas

Efektivitas berfokus pada sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Variabel ini mencakup beberapa aspek penting: Kualitas: Menilai kualitas output yang dihasilkan oleh organisasi, termasuk bagaimana layanan memenuhi standar yang ditetapkan dan harapan masyarakat. Produktivitas: Mengukur kuantitas dari jasa atau produk yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui seberapa banyak layanan yang dapat diberikan dalam periode tertentu. Kesiagaan: Penilaian menyeluruh terhadap kemampuan organisasi dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik dan tepat waktu. Ini mencerminkan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan dan memenuhi tuntutan pelayanan publik

c) Keadilan

Keadilan mempertanyakan aspek distribusi dan alokasi layanan yang diberikan oleh organisasi. Variabel ini penting karena: Ketercukupan atau kepantasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat: Organisasi harus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak diskriminatif. Isu pemerataan pembangunan: Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana layanan disebarkan secara merata, terutama bagi kelompok marginal yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Dengan memilih ketiga variabel ini efisiensi, efektivitas, dan keadilan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang. Variabel-variabel ini saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa segala permasalahan yang sudah peneliti jelaskan di bagian latar belakang.

1.5.5. Faktor Penghambat Kinerja

Dikutip dari jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Semarang (Firul, 2015), dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau program, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam lingkungan internal organisasi itu sendiri, maupun dari lingkungan eksternal di luar organisasi. Menurut pandangan para ahli,

terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Menurut (Soesilo, 2014), kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a) Struktur organisasi yang berkaitan dengan hubungan internal dan fungsi pelaksanaan aktivitas organisasi.
- b) Kebijakan pengelolaan yang mencakup visi dan misi organisasi.
- c) Sumber daya manusia yang terkait dengan kualitas karyawan dalam bekerja secara optimal.
- d) Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- e) Sarana dan prasarana yang dimiliki terkait penggunaan teknologi dalam setiap aktivitas organisasi.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar suatu organisasi memiliki kinerja yang baik menurut Wibowo:

- a) Pernyataan Maksud dan Nilai-nilai
 - 1. Mendefinisikan bagaimana organisasi diatur untuk melakukan sesuatu yang berorientasi pada hasil/manfaat
 - 2. Pernyataan maksud menjelaskan apa yang harus dicapai, sedangkan nilai-nilai menentukan perilaku yang diharapkan
 - 3. Mencakup aspek kerja sama, orientasi kualitas, perhatian pada pelanggan, dan penghargaan individu

b) Manajemen Strategis

1. Rangkaian keputusan dan tindakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan organisasi
2. Merumuskan variabel yang harus dikendalikan untuk mencapai tujuan

c) Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Harmonisasi kriteria untuk semua staf, pengembangan organisasi pembelajaran
2. Informasi kinerja dan prospek organisasi, kebijakan keamanan kerja, sistem pengupahan berdasarkan merit

d) Pengembangan Organisasi

1. Perencanaan dan implementasi program untuk memperbaiki efektivitas dan mengelola perubahan

e) Konteks Organisasi

1. Kinerja dipengaruhi rencana manajerial, struktur organisasi, dan kondisi eksternal-internal

f) Desain Kerja

1. Spesifikasi isi, metode, dan hubungan pekerjaan untuk mengatur konteks, harapan peran, dan kebutuhan individu

g) Fungsionalisasi

1. Masalah fungsional seperti sentralisasi kontrol hasil, pendelegasian kewenangan, dan struktur organisasi

h) Budaya

1. Nilai-nilai sebagai keyakinan tentang yang baik bagi organisasi dan perilaku yang diinginkan
 2. Norma-norma mengatur cara kerja manajemen
- i) Kerja Sama
1. Penggunaan tim multifungsional, multidisiplin, dan bentuk organisasi lain
 2. Kinerja organisasi ditentukan kinerja tim dengan latar belakang berbeda

Sementara itu, menurut Ruky, faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi antara lain:

- a) Teknologi seperti peralatan dan metode kerja untuk menghasilkan produk/jasa.
- b) Kualitas *input* atau bahan baku yang digunakan organisasi.
- c) Lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruang, dan kebersihan.
- d) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan kerja dalam organisasi.
- e) Kepemimpinan dalam mengendalikan anggota agar bekerja sesuai standar dan tujuan.
- f) Pengelolaan sumber daya manusia termasuk kompensasi, imbalan, dan promosi.

Dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang, pemilihan dua variabel utama untuk mengukur faktor penghambat Kinerja Organisasi yaitu kebijakan pengelolaan yang mencakup visi dan misi organisasi serta sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database merupakan langkah penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pemilihan masing-masing variabel tersebut:

a) Kebijakan Pengelolaan yang Mencakup Visi dan Misi Organisasi

Kebijakan pengelolaan yang jelas dan terarah sangat penting bagi setiap organisasi, terutama dalam konteks pelayanan publik. Pemilihan variabel ini mencakup beberapa aspek: Visi yang Jelas: Visi organisasi memberikan gambaran tentang tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Dengan memiliki visi yang jelas, seluruh anggota organisasi dapat memahami arah dan tujuan bersama, sehingga meningkatkan komitmen dan motivasi untuk mencapainya. Misi yang Terdefinisi: Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek hingga menengah. Misi yang kuat membantu dalam fokus pada tujuan operasional sehari-hari, memastikan bahwa semua kegiatan organisasi selaras dengan tujuan utama. Pengukuran Kinerja: Kebijakan pengelolaan ini memungkinkan organisasi untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan, sehingga dapat mengukur

sejauh mana visi dan misi telah tercapai. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

b) Sistem Informasi Manajemen yang Berhubungan dengan Pengelolaan Database

Sistem informasi manajemen (SIM) berfungsi sebagai alat penting dalam pengelolaan data dan informasi di organisasi. Pemilihan variabel ini memiliki alasan sebagai berikut: Pengelolaan Data yang Efisien: SIM memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data dengan efisien. Dengan sistem database yang terstruktur dengan baik, informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dukungan Pengambilan Keputusan: Dengan menyediakan akses ke data yang terpusat dan terstruktur, SIM membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Analisis data yang dilakukan melalui sistem ini memungkinkan identifikasi tren dan pola yang relevan untuk strategi bisnis. Peningkatan Kinerja Organisasi: Implementasi SIM berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, produktivitas karyawan, serta pengurangan biaya operasional. Sistem ini juga mendukung integrasi data antar departemen, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di dalam organisasi.

Dengan memilih kedua variabel ini kebijakan pengelolaan yang mencakup visi dan misi serta sistem informasi manajemen penelitian dapat

memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor penghambat kinerja organisasi di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang. Variabel-variabel ini saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya memiliki arah strategis tetapi juga alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.

1.6. Operasionalisasi Konsep

A. Kinerja Organisasi

Teori	Gejala	Sub Gejala
Kinerja Organisasi	Efisiensi	<i>1. Input</i> - APBD : Tersedianya alokasi APBD untuk menunjang kualitas Pasar Tradisional di Kabupaten Rembang - Retribusi : Penerimaan retribusi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan fasilitas pasar. <i>2. Output</i> - Sarana Prasarana : Sarana dan prasarana pasar

		memenuhi standar yang baik, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pedagang dan pengunjung. - Kualitas Pasar : Kualitas pasar melalui pengelolaan yang baik, memastikan bahwa semua aspek pelayanan berjalan dengan optimal.
	Efektifitas	1. Kualitas - Kualitas layanan : Kualitas layanan yang diberikan dengan fokus pada kepuasan pengguna pasar melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan pedagang dan masyarakat. 2. Produktivitas

		- Kuantitas Layanan : Kuantitas layanan untuk memastikan bahwa semua permintaan pedagang dan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat waktu dan efisien. 3. Kesiagaan - Kesiapan Sumber Daya Manusia : Kesiapan sumber daya manusia dijamin melalui pelatihan yang berkelanjutan, sehingga pegawai dapat melayani masyarakat dengan baik dan profesional.
	Keadilan	1. Ketercukupan/kepantasan - Ketersediaan Layanan : Ketersediaan layanan mencakup aksesibilitas yang baik bagi seluruh lapisan pengguna pasar baik

		pedagang maupun masyarakat. - Ketersediaan Anggaran : Ketersediaan anggaran yang memadai harus dipastikan untuk mendukung semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam pengelolaan pasar. 2. Kemerataan Pelayanan - Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur : Penguatan kapasitas dan infrastruktur pasar untuk memastikan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah, sehingga tidak ada daerah yang terabaikan dalam mendapatkan akses terhadap layanan pasar.
--	--	---

Dikutip dari jurnal yang berjudul Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis

Di Kota Manado (Andu, 2023), menurut Kumorotomo (1996), terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai kinerja organisasi dalam pelayanan publik. Kriteria-kriteria ini berfungsi sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat., antara lain

a. Efisiensi

Efisiensi adalah salah satu komponen dari produktivitas yang mempertimbangkan rasio antara output dan input (Coelli et al., 2005) dalam (Rasyidi, 2019). Oleh karena itu, dalam mengukur efisiensi, langkah paling krusial adalah memberikan interpretasi yang tepat terhadap input dan output suatu organisasi.

a) *Input*

Dalam konteks pelayanan publik, *input* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk terlaksananya proses pelayanan publik. *Input* tersebut dapat berupa sumber daya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta perangkat lunak seperti regulasi, pedoman, dan standar pelayanan. Selain itu, *input* juga mencakup harapan-harapan dan masukan-masukan dari masyarakat sebagai pemandu agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b) *Output*

Dalam konteks pelayanan publik, *output* tidak akan pernah lepas dari penilaian dan evaluasi. Penilaian atau evaluasi terhadap pelayanan

publik sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi pelayanan publik diperlukan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan agar pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

b. Efektivitas

Apakah tujuan dari pendirian organisasi pelayanan publik telah tercapai? Hal ini berkaitan erat dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi sebagai agen pembangunan. Ricard M. Streers (dalam Nadia Azlin, 2013: 18) mengemukakan beberapa ukuran efektivitas, yaitu kualitas, produktivitas, dan kesiagaan.

a) Kualitas

Dalam konteks pelayanan publik, kualitas mengacu pada tingkat kualitas layanan yang dihasilkan oleh organisasi penyedia layanan publik (pemerintah/instansi). Kualitas pelayanan publik mengacu pada seberapa baik pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kualitas menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana organisasi penyedia layanan publik dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.

b) Produktivitas

Dalam konteks pelayanan publik, produktivitas mengacu pada kuantitas atau jumlah layanan yang dapat diberikan oleh organisasi penyedia layanan publik kepada masyarakat. Produktivitas pelayanan publik berkaitan dengan seberapa banyak layanan yang dapat dihasilkan dan diberikan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tingkat produktivitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kapasitas dan kemampuan organisasi penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik.

c) Kesiagaan

Dalam konteks pelayanan publik, kesiagaan mengacu pada penilaian menyeluruh terkait dengan kemampuan organisasi penyedia layanan publik dalam mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kesiagaan pelayanan publik meliputi kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, regulasi, serta sistem dan prosedur yang memadai untuk mengantisipasi dan merespons kebutuhan masyarakat akan pelayanan tertentu secara tepat dan optimal.

c. Keadilan

Keadilan berfokus pada distribusi dan alokasi layanan yang diberikan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini berkaitan erat dengan konsep ketercukupan atau keadilan, yang mempertanyakan apakah tingkat efektivitas tertentu dapat memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat. Isu-isu terkait pemerataan pembangunan, layanan untuk kelompok marginal, dan sejenisnya dapat dievaluasi melalui kriteria ini, yang mencakup ketercukupan/kepantasan serta pemerataan pelayanan.

a) Ketercukupan/Kepantasan

Ketercukupan/kepantasan dalam konteks pelayanan publik dapat diartikan sebagai: Ketercukupan sumber daya yang dimiliki organisasi penyedia layanan publik, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Kepantasan dalam arti kesesuaian standar pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

b) Kemerataan Pelayanan

Penguatan kapasitas dan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal merupakan upaya penting untuk mencapai pemerataan pelayanan publik yang optimal. Kemerataan pelayanan publik menjadi indikator penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

B. Faktor Penghambat Kinerja Organisasi

Faktor	Gejala	Sub Gejala
	1. Kebijakan Pengelolaan	1. Visi - Tujuan Jangka Panjang Organisasi : Visi harus mencerminkan tujuan

Penghambat Kinerja Organisasi		jangka panjang organisasi untuk menjadi pusat perdagangan yang terkemuka dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pelaku usaha. 2. Misi - Tujuan Dasar/Alasan dari Program Kerja : Misi harus menjelaskan alasan keberadaan organisasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pasar yang efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
	2. Sistem Informasi Manajemen	1. Kualitas Sistem - Kebijakan : Kebijakan yang jelas untuk mendukung pengelolaan pasar yang transparan dan akuntabel. - <i>Hardware</i> : Infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional pasar dan pelayanan publik.

		- <i>Software</i> : Sistem perangkat lunak yang efektif untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi pasar secara efisien. 2. Kualitas Informasi - Kemudahan Akses Informasi : Informasi terkait layanan dan kegiatan pasar yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. - Pemahaman Informasi : Penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat terkait layanan pasar. 3. Kualitas Layanan - Kemudahan Akses Pelayanan : Layanan publik yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok
--	--	--

		marginal, untuk memastikan pemerataan dalam pelayanan.
--	--	--

Menurut (Soesilo, 2014), kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan yang mencakup visi misi organisasi.

1) Visi

Visi adalah gambaran atau pandangan jauh ke depan tentang suatu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau lembaga di masa yang akan datang. Visi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena memberikan arah dan tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan.

2) Misi

Misi adalah tujuan dasar atau alasan keberadaan dari sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Misi menjelaskan maksud atau alasan mengapa organisasi itu dibentuk dan apa yang ingin dicapai.

2. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam pengelolaan database yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Menurut DeLone dan McLean (dalam Jogiyanto, 2018), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai sistem informasi manajemen, yaitu:

1) Kualitas Sistem (system quality)

Ini merujuk pada kualitas kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi. Fokus utama adalah pada performa sistem, yang mencakup seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

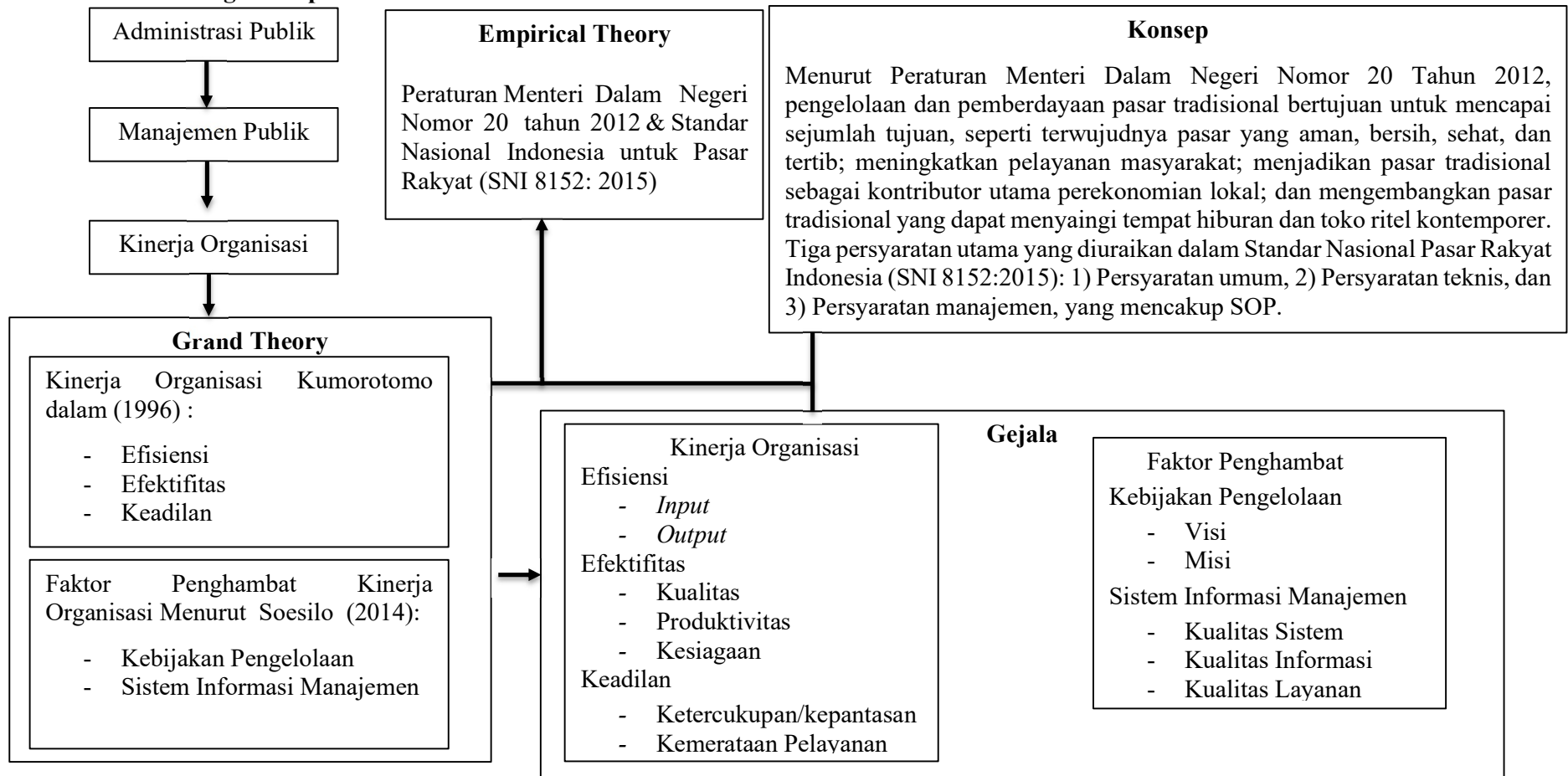
2) Kualitas Informasi

DeLone dan McLean menyatakan bahwa pengolahan dalam suatu sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan output informasi yang berkualitas tinggi, memberikan nilai tambah bagi pengguna akhir.

3) Kualitas Layanan

Kualitas layanan sistem informasi mencakup tingkat pelayanan atau dukungan yang diterima pengguna dari staf atau personil sistem informasi. Dimensi-dimensi kualitas harus dapat diidentifikasi untuk menilai kualitas layanan ini (Susilowati, 2020).

1.6.1. Kerangka Berpikir



1.7. Metode Penelitian

Menurut Wimmer dan Dominick dalam Morissan (2012), penelitian adalah upaya untuk menemukan sesuatu baru. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, diperlukan desain atau rencana kerja menyeluruh yang berupa metode ilmiah operasional, termasuk rincian keputusan beserta alasan ilmiahnya.

Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini dipilih dengan beberapa pertimbangan:

- 1) lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan jamak,
- 2) menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan informan, dan
- 3) lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan pola-pola nilai yang dihadapi (Maloeng, 2007: 10-13).

Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pengolahan data (Djam'an Satori, 2011: 23). Metode ini digunakan untuk menjelaskan penelitian saat ini tanpa mengubah data variable yang diteliti melalui wawancara langsung (Bahri, 2017: 73).

1.7.1. Tipe Penelitian

Terdapat dua tipe penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian eksploratif. Penelitian deskriptif adalah upaya memecahkan masalah dengan membandingkan, mengklasifikasikan, dan menetapkan pengaruh antargejala yang ditentukan. Sementara penelitian eksploratif

digunakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu dalam rangka merumuskan masalah secara terperinci.

Peneliti memilih menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta variabel-variabel menurut pandangan dan dimensi partisipan. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi mengenai status variabel, tema, gejala, atau keadaan yang ada sesuai dengan kondisi saat penelitian dilakukan.

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di dalam Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang khususnya di dalam Bidang Pasar dengan kajian kinerja organisasi. Bidang Pasar yang memiliki program kerja dalam mendukung pencapaian setiap visi dan misi organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam sebuah penelitian merujuk pada informan atau narasumber yang akan dimintai informasi atau data. Peneliti memilih subjek penelitian secara purposive atau sengaja, bukan secara acak. Purposive berarti subjek dipilih karena memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan informasi peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang akan menentukan subjek yang sesuai karakteristiknya.

Menurut Morisson (2012:117), purposive atau subjek terpilih dapat didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel non-probabilitas dimana unit yang akan diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa unit tersebut paling bermanfaat dan representatif. Subjek dalam penelitian akan berperan sebagai informan yang menentukan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah:

- 1) Kepala Bidang Pasar, Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kabupaten Rembang.
- 2) 7 Staf Bidang Pasar, Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kabupaten Rembang.
- 3) Pengguna Pasar Tradisional Kabupaten Rembang, 15 Pedagang dan 2 Pembeli. Pengguna Pasar menjadi subjek penting karena merasakan langsung dampak dari kinerja pemerintah.

Untuk subjek pengguna Pasar Tradisional Kabupaten Rembang, peneliti menggunakan teknik *Non Probability Insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:96).

1.7.4. Jenis Data

Data kualitatif merupakan data deskriptif yang lebih menitikberatkan pada penafsiran dan pemahaman terhadap topik yang diteliti. Data ini biasanya berbentuk teks, transkrip wawancara, catatan

lapangan atau dokumen lainnya. Data kualitatif memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konten yang diteliti. Jenis data yang digunakan yaitu tipe data kualitatif yang menunjukkan suatu permasalahan secara deskriptif tertulis atau berupa kalimat, teks, frasa dll. Selain itu juga terdapat data yang berbentuk tabel yang berisi keterangan permasalahan yang dapat dinarasikan secara deskriptif.

Data kualitatif mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan data kuantitatif. karakteristik ini meliputi:

- 1) Subjektif: Data kualitatif mencerminkan pandangan dan pengalaman setiap subjek yang diteliti, termasuk opini.
- 2) Deskriptif: Data kualitatif menggambarkan suatu fenomena secara deskriptif dan tidak melalui pengukuran atau angka.
- 3) Unik: Semua data kualitatif bersifat unik, sesuai dengan konteksnya, dan tidak dapat digeneralisasi seperti data kuantitatif.
- 4) Kontekstual: Data kualitatif sering digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang konteks pengumpulan data.

Pada penelitian kualitatif deskriptif, jenis data yang digunakan berupa catatan lapangan, teks mengenai suatu fenomena, hasil wawancara dengan informan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang.

1.7.5. Sumber Data

- 1) Data Primer

- a) Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan daftar pertanyaan/pedoman wawancara
- b) Informan meliputi Kepala Bidang Pasar, Staf Bidang Pasar, Pedagang, dan Pembeli di Pasar tradisional Kab. Rembang
- c) Juga dapat diperoleh melalui observasi/pengamatan langsung di lapangan

2) Data Sekunder

- a) Diperoleh dari studi pustaka atau sumber informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- b) Peneliti tidak memperoleh data secara langsung dari sumbernya
- c) Dapat berupa tinjauan pustaka, koran, buku, data statistik, laporan, dokumen, internet, media massa, surat kabar, dll.

Data primer bersifat utama yang dikumpulkan khusus untuk penelitian ini, sementara data sekunder bersifat pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang relevan. Kombinasi kedua jenis data ini akan membantu peneliti memperoleh informasi yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dikutip dari (Tanujaya, 2017) menurut Ridwan (2010), teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, teknik yang diterapkan meliputi wawancara, studi dokumentasi, dan survei atau observasi.

Nazir (1988) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, menggunakan alat bantu yang disebut pedoman wawancara. Wawancara memungkinkan pengumpulan data secara langsung melalui komunikasi dengan informan, memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan mereka tentang topik yang diteliti.

Sementara itu, Basrowi dan Suwandi dalam buku "Pengertian Penelitian Kualitatif" mendefinisikan observasi sebagai metode mencatat perilaku secara sistematis melalui pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok yang sedang diteliti. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian di lokasi kejadian secara langsung, yang dapat mencakup perilaku manusia maupun fenomena tertentu.

Dikutip dari (Firul, 2015) Sugiyono (2017) menambahkan bahwa studi dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, berkas, dokumen, angka tertulis, dan gambar yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggunakan sumber yang ada untuk memperkuat hipotesis dan memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai topik tanpa harus mengumpulkan data secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode pengumpulan data seperti diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan studi kasus. Data kualitatif dapat berupa catatan hasil

pengamatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian, dan jurnal.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- 1) Wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk menggali informasi secara mendalam dari informan.
- 2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti gambar, rekaman, atau buku pedoman yang relevan.
- 3) Observasi, berupa pengamatan langsung terhadap perilaku, proses kerja, atau gejala-gejala yang diteliti. Jenis observasi yang digunakan adalah non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan informasi ke dalam format yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Penulis akan menyusun uraian dan penjelasan mengenai data yang telah dikumpulkan, yang kemudian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, teknik pengkodean sangat penting saat menginterpretasikan data. Menurut Charmaz (2006) dalam Yukhymenko et al. (2014), pengkodean adalah proses yang dilakukan

selama penelitian di mana data yang terkumpul dikelompokkan atau disingkat namanya. Strauss dan Corbin (1990) dalam Vollstedt & Rezat (2019) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap pengkodean untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif. Pengkodean terbuka merupakan tahap pertama dalam proses ini. Menurut Strauss dan Corbin (2007) dalam Vollstedt & Rezat (2019), pengkodean terbuka melibatkan pembagian, analisis, perbandingan, konseptualisasi, dan pengkategorian data. Selanjutnya, pengkodean aksial adalah tahap kedua, di mana menurut Charmaz (2006) dalam Yukhymenko et al. (2014), proses ini menghubungkan kategori dengan subkategori serta menyusun ulang data yang telah dikategorikan untuk mengaitkannya dengan analisis yang dihasilkan. Tahap ketiga adalah pengkodean selektif; menurut Strauss dan Corbin (2007) dalam Vollstedt & Rezat (2019), ini adalah metode untuk menghubungkan kategori lain yang perlu disempurnakan dan menyusunnya secara sistematis menjadi kalimat. Peranan ketiga jenis pengkodean-pengkodean terbuka, aksial, dan selektif sangat krusial dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan model analisis data lapangan dari Miles dan Huberman. Proses analisis dalam model ini terdiri dari tiga tahap utama.

1) Reduksi Data

- a) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

- b) Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya.
- c) Reduksi data akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya jika diperlukan.
- d) Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian kualitatif yaitu menemukan temuan.

2) Penyajian Data

- a) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
- b) Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks naratif.
- c) Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

- a) Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui verifikasi bukti-bukti valid
- b) Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya
- c) Jika didukung bukti-bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan kredibel
- d) Temuan dapat berupa deskripsi obyek yang semula remang-remang menjadi jelas, hubungan kausal, hipotesis, atau teori.

1.7.8. Kualitas Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang baik dalam penelitian ini, pengukuran kredibilitas (derajat kepercayaan) dilakukan terhadap Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang. Pengukuran kredibilitas dapat diperoleh melalui beberapa teknik pemeriksaan, seperti perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kredibilitas dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Moleong dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif" merangkum pendapat beberapa ahli dan menyimpulkan bahwa penggunaan triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber, metode, atau teori yang berbeda. Jadi, untuk menjamin kualitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, metode pengumpulan data, atau teori yang relevan agar diperoleh data yang kredibel dan dapat dipercaya. Moleong menyatakan bahwa triangulasi dapat dicapai dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan perkataan seseorang di depan umum dengan perkataan pribadinya

- 3) Membandingkan perkataan seseorang tentang situasi penelitian dengan perkataan sepanjang waktu
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat orang lain seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang berada, pemerintah
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait

Triangulasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi Bidang Pasar Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Semarang. Teknik ini digunakan untuk mengecek keabsahan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan wawancara dengan berbagai informan
- 2) Menguji silang antara hasil wawancara informan dengan isi dokumen terkait
- 3) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 4) Membandingkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya

Jadi peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber (pengamatan, wawancara, dokumen) dan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda sesuai dengan cara-cara triangulasi yang dikemukakan oleh Moleo